

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan yang dialami setiap negara pada umumnya dialami juga oleh negara lain dalam cakupan general. Berbagai macam permasalahan dalam bidang ekonomi, politik, keamanan, pendidikan, HAM, dan bahkan konflik diantara negara. Hal ini yang menyebabkan peliknya permasalahan yang dialami oleh setiap negara akan terasa lebih berat apabila permasalahan tersebut berhubungan dengan negara lain. Sedangkan konflik dalam negara sering kali dibagi menjadi dua pandangan konflik, pertama konflik horizontal dimana aktor yang berperan dalam konflik tersebut ada dua atau lebih kelompok dari dalam negara tersebut, sedangkan konflik vertikal adalah konflik yang hanya melibatkan dua aktor yaitu satu kelompok melawan pemerintah nya sendiri (Susan, 2009).

Salah satu benua yang masih intens adanya konflik antara negara dan masyarakat nya adalah benua Afrika. Negara-negara di Afrika masih belum bisa menstabilkan keadaan pemerintahannya hingga sekarang setelah perang dunia ke dua. Konflik yang sering terjadi adalah pemberontakan yang di lakukan oleh masyarakat untuk melawan, memprotes, atau bahkan menggulingkan pemerintahannya. Salah satu negara yang mengalami kejadian tersebut di daratan Afrika adalah negara Mali.

Mali sendiri adalah negara yang merdeka pada tanggal 20 Juni 1960 dimana tanggal tersebut sebagai kemerdekaan yang di berikan oleh Prancis pada kala itu sebagai negara yang menjajah Mali, sedangkan Mali sendiri mengakui tanggal kemerdekaannya adalah 22 September 1960 (Andini, 2017).

Hubungan erat antara Mali dan Prancis ini di mulai pada saat Prancis menjadi negara yang menjajah daerah Mali pada tahun 1895-an, di mana pada saat itu Prancis hampir menguasai dan menaklukan di Afrika bagian barat yang akhirnya mendirikan Afrika Barat Prancis. Negara-negara yang menjadi negara dari jajahan Prancis tersebut antara lain Guinea, Mali, dan Senegal. Nama lain Mali pada masa penjajahan Prancis sendiri adalah Sudan Mali. Karena penjajahan yang terbilang sangat lama di Mali akhirnya bahasa resmi negara Mali sendiri adalah bahasa Prancis padahal di sisi lain suku Bambara yang menjadi suku terbesar di Mali memiliki bahasanya sendiri (Komandoko, 2010). Sebagian penduduk Mali juga menganut agama Islam yang menjadikan Mali sebagai salah satu negara yang penduduk muslim terbanyak di Afrika.

Setelah kebebasan dan kemerdekaan yang dirasakan, Mali terlepas dari Prancis. Permasalahan pemberontakan sudah terjadi sejak 1961, satu tahun setelah kemerdekaan Mali itu sendiri. Pemberontakan itu di lakukan oleh etnis Tuareg yang menyatakan tidak setuju atas sistem pemerintahan negara Mali pada saat itu. Etnis ini adalah etnis yang sebagian besar berasal dari Azawad, Mali. Pemberontakan ini berawal tentang suatu kebijakan yang melarang etnis Tuareg untuk tinggal dan bekerja di luar wilayah Azawad, kebijakan itu di anggap mendiskriminasi etnis Tuareg yang menyebabkan pemberontakan

tersebut (Ervianto, 2013). Pemberontakan ini digadang-gadang sebagai bibit awal banyaknya pemberontakan yang terjadi di Mali yang di lakukan di beberapa daerahnya. Pemberontak pertama yang di lakukan secara fisik adalah pada tahun 1963. Pada saat itu juga, undang-undang mengenai darurat militer pertama kali di serukan bagi seluruh penduduk sipil untuk tidak mendekati daerah Azawad. Setelah pemberontakan tersebut belum ada lagi pemberontakan yang di anggap besar di daerah Mali karena pada awal tahun 1970 hingga akhir 1980-an daerah Mali mengalami kekeringan dan kebanyakan kejadian tersebut terjadi di Azawad yang akhirnya mengharuskan banyak nya etnis Tuareg mengungsi ke negara-negara tetangga contohnya adalah negara Libya.

Banyak dari penduduk Azawad tersebut yang pada masa pemberontak pindah ke Libya sehingga mereka di rekrut oleh militan Libya yang bernama "*Legium Islam*". Pada akhirnya memberikan mereka ilmu dan persenjataan untuk melakukan pemberontakan di Mali pada sekitar tahun 1991 (Sammy, 2011). Namun pemberontakan itu bisa di redam karena pada saat itu presiden Mali yaitu Alpha Konare memberikan otonomi yang cukup bagi Azawad yang akhirnya meredakan konflik untuk beberapa waktu. Setelah itupun pada tahun 1992 pemilu pertama di selenggarakan di Mali.

Pada awal tahun 2012 tepatnya pada bulan Januari, para pemberontak dari daerah Azawad yang di sebut sebagai *National Movement for the Liberation of Azawad* (MNLA) melakukan kampanye terlebih dahulu untuk segera memberikan keputusan bahwa bagian Azawad khususnya yang di tinggali oleh etnis Tuareg untuk dibebaskan dari negara Mali (Kistyarini,

2012). Azawad sendiri memang kebanyakan di tempati oleh etnis Tuareg tetapi Azawad sendiri adalah 60% bagian dari Mali dan kemungkinan kecil apabila pemerintah akan dengan sukarela melepaskan daerah Azawad menjadi negara merdeka. Pada masa itu Presiden dari Mali sendiri adalah Amadou Toumani Touré, Presiden Amadou sendiri harus digulingkan oleh pihak militer Mali karena dianggap tidak menangani permasalahan dan pemberontakan yang terjadi di Azawad yang akhirnya pada bulan Maret 2012 Presiden Amadou harus menigggalkan jabatannya.

Kudeta yang dilakukan oleh pihak militer Mali dipimpin oleh Amadou Sanogo dimana mereka menyebut pergerakan atas penggulingan Presiden Mali disebut *National Committee for the Restoration of Democracy and State* (NCRDR). Pada masa setelah penggulingan tersebut, Mali hanya memiliki Presiden dan Menteri sementara yang menjadi kurangnya kontrol pada otonomi-otonomi daerah, sementara hal ini yang di manfaatkan oleh MNLA yang akhirnya menjadikan pemberontakan dan perlawanan yang terjadi (Arieff, 2013). Dari pemberontakan yang terjadi tersebut dan kurangnya kontrol dari pemimpin pemerintahan pada masa itu, akhirnya Azawad pada 6 April 2012 jatuh di tangan MNLA. Keberhasilan yang di dapatkan oleh MNLA ini sendiri dibantu oleh beberapa kelompok lain sebagai berikut ada Islam Ansar Dine, Al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM), dan the Movement for Unity and Jihad in west Africa (MUJAO).

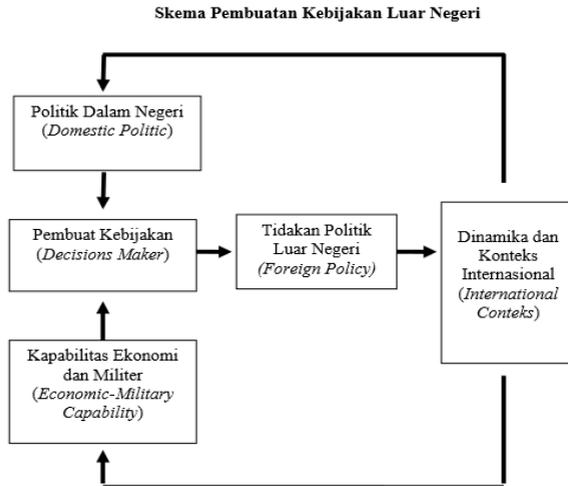
Dari paparan atas konflik yang terjadi hanya dua belah pihak konflik horizontal, di mana antara pemerintah dan kelompok pemberontak. Akan tetapi seiring dengan berjalan nya waktu konflik ini

memunculkan seorang aktor baru yaitu Prancis di mana Prancis melakukan beberapa tindakan. Tindakan-tindakan tersebut tidak akan terjadi apabila seorang pemimpin suatu negara dan pemerintah menyetujui rencana tersebut. Pada masa keikutsertaan Prancis untuk ikut serta dalam konflik ini Prancis sedang di pimpin oleh Presiden Francois Hollande.

Tindakan-tindakan yang di lakukan oleh Prancis atas konflik yang dialami di Mali sebagian besar adalah keputusan Presiden François. Tindakan yang dilakukan oleh Presiden Francois ini sendiri di mulai dari cara soft hingga hard. Prancis juga mengusulkan bahwa permasalahan Mali ini adalah masalah yang cukup dianggap terdesak dan harus diselesaikan bersama.

Pada masa konflik di Mali, Prancis adalah salah satu negara yang memiliki power yang melakukan intervensi berkelanjutan dalam konflik Mali tersebut. Intervensi itu sangat intens dilakukan pada bulan Januari 2013 dibawah kepemimpinan presiden Prancis yaitu Francois Hollande. Oleh sebab atas apa yang terjadi di Mali dengan intervensi nya Prancis dengan perintah yang di berikan Presiden Francois Hollande melakukan suatu tindakan dalam konflik tersebut, penulis menganggap hal tersebut bisa menjadi bahan teliti dalam menyelesaikan tugas akhir untuk mencapai strata satu. Bahan teliti ini meliputi nilai dan citra apa yang ada dalam diri Presiden Francois Hollande sehingga menyetujui untuk melakukan intervensi dalam konflik Mali.

Telah di terangkan oleh Wiliam D, Coplin dalam tabel nya bahwa seorang Individu memiliki pengaruh yang cukup besar dalam suatu pengambilan kebijakan luar negeri seperti gambar di bawah ini.



*Gambar 1.1: Skema Pembuatan Kebijakan Luar Negeri
William D. Coplin*

B. Rumusan Masalah

Selama konflik di Mali tidak pernah terlepas dari pengawasan Prancis khususnya Presiden Francois Hollande. Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang diajukan adalah:

Apa citra dan nilai dari Francois Hollande yang memberikan pengaruh terhadap keberpihakan Prancis terhadap Pemerintahan Mali pada konflik tahun 2013?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-faktor yang mendorong Prancis khususnya atas persefektif Preside Francois Hollande untuk berpihak pada pemerintah Mali dalam konflik Mali serta mengetahui langkah apa yang diberikan Prancis untuk meredam konflik tersebut.

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang diharapkan bisa di gunakan untuk menjawab atas penelitian ini adalah kerangka Analisis Individu dengan penjelasan sebagai berikut:

Analisis Individu

Untuk bisa mendeskripsikan permasalahan dan mendukung untuk menjawab studi masalah dalam skripsi ini saya pertama-tama menggunakan studi analisa. Dalam studi kasus ini saya akan menjelaskan apa itu sebenarnya “Unit Analisa”, adalah sesuatu hal yang perilakunya, kita jelaskan atau deskripsikan dan kita ramalkan (yang mana hal tersebut menjadi “variabel independen”) dan “unit eksplanasi” yang mana akan berdampak pada unit analisa yang akan henda kita amati. Sehingga pada dasarnya apabila kita ingin menelaah sesuatu dari segi hubungan ininternasional adanya ketidak mungkinan kita secara fisik menelaah dari semua aspek. Karena menurut J. David Singer

“Dalam setiap bidang kegiatan keilmuan, selalu terdapat berbagai cara memilah-milah dan mengatur fenomena yang di pelajari demi analisis yang sistematis. Baik dalam ilmu fisik maupun ilmu sosial, pengamat harus memilih pusat perhatian, pada bagian-bagian nya atau

pada keseleuruhan fenomena itu, pada komppnennya atau pada sistemnya. Misalnya ia bisa memilih mau memperhatikan bunga atau kebunnya, pohon atau hutannya rumah atau kampungnya, remaja nakal atau kelompok gangnya, anggota DPR atau parlemen, dan sebagainya.” (Singer, 1961)

Pada penjelasan Singer ini kita bisa memahami bahwa kita bisa saja mempelajari hanya suatu “bagian” dari sesuatu atau mempelajari pindah tingkat analisis bisa lebih naik atau general “keseluruhan”. Salah satu contohnya adalah misalnya apabila kita ingin melakukan suatu analisis pada suatu pengambilan kebijakan suatu negara pertama yang biasanya di lakukan kita akan akan mempelajari politik dalam negeri suatu negara tersebut terlebih dahulu apa yang mempengaruhi si pengambil kebijakan di negara tersebut mengambil kebijakan tersebut dengan di mana adanya alternatif-alternatif lain sebelum dia setuju untuk mengambil kebijakan tersebut. Kedua kita akan mempelajari sistem internasional yang merupakan bagian lingkungan umum bagi sebuah negara di mana lingkup internasional ini mempengaruhi suatu proses pembuatan keputusan tersebut, dan dengan demikian akan menambahkan nya pertimbangan si pengambilan kebijakan di suatu negara tersebut.

Dalam tingkat analisis ini juga menerangkan bahwa pertama biasanya untuk menjelaskan perilaku aktor internasional yang biasanya di presentasikan sebagai sebuah negara berdaulat, terdapat lebih satu aktor dalam negara tersebut yang menyebabkan perilaku tersebut, mulai dari perilaku individual pemimpin, perilaku kelompok, karakteristik negara itu sendiri, hubungan dengan beberapa negara dalam

lingkungan regional, sampai struktur hubungan pada tingkat global. Kedua dalam tingkat analisis juga kita bisa lebih mengetahui bahwa faktor apa yang paling menekan suatu pengambilan kebijakan suatu negara, yang pada dasarnya apabila ada suatu faktor sangat berpengaruh dalam situasi lain bisa saja faktor tersebut tidak mempengaruhi pada situasi yang sama akan tetapi berbeda tempat. Salah satu contohnya adalah perubahan rezim di Iran sangat di pengaruhi atas analisa individu yaitu Imam Khomeini, tetapi di sisi lain perubahan rezim di Filipina pada tahun 1980-an tidak bisa di jelaskan dengan analisa individu nya Nyonya Aquino. Ketiga dalam tingkat analisis juga kita bisa mengetahui sekumpulan dampak dari sekumpulan faktor tertentu terhadap suatu fenomena dan mana dampak dari kumpulan faktor lain terhadap fenomena itu; dan kemudian memperbandingkan dampak dari kedua kelompok faktor yang berbeda itu (Mas'ood, Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi, 1990).

Keempat dalam menganalisis atau mendeskripsikan sesuatu pasti kita ada kemungkinan membuat suatu kesalahan metodologis yang bisa disebut *Fallacy of Composition* dan *Ecological Fallacy*. Salah satu contoh kesalahan yang kemungkinan di buat adalah kesalahan asumsi apabila ada kesalahan dalam suatu “bagian” bisa di generalisasikan sebagai kesalahan atas “keseluruhan”. Bisa di contohkan dalam pemahaman Morhenthau bahwa pada dasarnya manusia akan selalu menggunakan power tanpa henti untuk mencapai tujuan apa yang dia inginkan, sehingga beliau menyimpulkan bahwa setiap individu yang mewakilkan negaranya akan mendefinisikan atau menggunakan power untuk mencapai tujuannya dan siap untuk memperbesar power negaranya tanpa ada

patokan untuk berhenti kecuali ada penghalang tandingan lain yang menghentikannya. Hal tersebut dalam tidak bisa dibenarkan adanya dalam lingkup HI. Salah satu contoh lainnya adalah apabila suatu negara terkenal dengan sebutan negara cinta damai belum tentu kita bisa menyatakan bahwa seluruh masyarakat di negara tersebut “cinta damai”.

Setelah kita tahu bahwa suatu tingkatan analisis itu sangat penting maka dalam tingkatan analisis juga terdapat identifikasi analisis apa yang akan kita gunakan untuk menggunakan analisis ini. Untuk mendukung analisis ini penulis menggunakan tingkatan identifikasi analisis individu. Tingkatan analisis individu ini adalah tingkatan analisis yang beranggapan bahwa fenomena hubungan internasional sebenarnya adalah dampak dari individu-individu yang berinteraksi satu sama lain secara eksternal tentunya. Maka dari itu dalam memahami hubungan internasional dalam studi kasus skripsi ini menelaah sikap dan perilaku tokoh-tokoh utama pembuat keputusan, seperti kepala pemerintahan, kepala negara, menteri luar negeri, penasehat, dan sebagainya.

Analisis yang menekankan dalam aktor individu disebut sebagai pendekatan mikro, dikarenakan unit analisisnya itu sendiri individu yang mikro. Pada dasarnya muncul pendekatan analisis individu ini karena para ilmuwan berasumsi bahwa pengetahuan politik adalah pengetahuan tentang manusia (Mas'ood, Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisis dan Reorisas, 1989). Dalam analisa Individu ini dijelaskan bahwa untuk memahami dunia politik, kita harus menelisik kenapa seorang manusia melakukan tindakan politik yang mengkaitkan apa hubungannya tindakan politik tersebut dengan kehendak, kebutuhan,

citra, dan nilai kenyakinan manusia tersebut. Di sisi lain analisis individu ini di dukung oleh pernyataan teori behavioralis bahwa politik itu di dasar atas perilaku politik individual (Morgan P. , *Theories and Approaches to International Politics*, 1981). Menurut para ilmuwan terdapat tiga alasan mendasar bahwa pendekatan analisis individu ini penting;

1. Analisis individu ini percaya bahwa negara-negara tidak melakukan suatu tindakan atau pengambilan keputusan, melainkan adalah para pemimpinnya yang melakukannya. Kita ketahui juga bahwa individu adalah unit analisis yang paling empirik dan mendasar.
2. Adanya keterlibatan suatu individu akan sesuatu situasi akan menimbulkan dampak yang berbeda-beda. Apabila kita tidak mempercayai bahwa citra, nilai, dan kualitas seorang individu berbeda dari yang lain serta keterlibatan individu tersebut bisa mendorong timbul hasil yang berbeda maka kenapa kita harus susah-susah melakukan suatu pemilihan untuk sesuatu?, Dari penjelasan barusan bisa kita telaah bahwa seseorang percaya suatu terjadi dan yang akan terjadi di depan bahwa bagian besar di tentukan oleh siapa yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan tersebut.
3. Alasan ketiga dimana para teoritis percaya bahwa dorongan dinamika yang terjadi di kanchah internasional pada akhirnya memang muncul dari diri manusia yang paling dalam. Telah di tuliskan bahwa dalam kosntitusi UNESCO:

“Karena perang bermula di dalam pikiran manusia, maka di dalam pikiran manusia itulah harus dibangun pertahanan bagi perdamaian.” (Morgan P. , *Theories and Approaches to International Politics*, 1982).

Sebenarnya dalam statment di atas tidak menunjukkan bahwa apakah benar tidak nya siapa yang memulai menanamkan nilai perang dalam pikiran manusia dan berkeinginan untuk mewujudkan hal tersebut. Tetapi pada dasarnya memang manusia di berikan berkehendak untuk melakukan tindakan agresif yang sudah tertanam, sehingga sering kali di simpulkan bahwa semua hal dalam politik internasional adalah akibat dari hakekat manusia. Pernah di jelaskan oleh H.J. Morgenthau mengatakan

“...betapapun tidak sempurnanya dari sudut pandang rasional, dunia ini adalah hasil dari dari kekuatan-kekuatan yang melekat pada hakekat manusia”.

Tetapi ada satu hal yang menyebabkan analisis individu ini terbilang cukup sulit untuk di telaah karena sebenarnya karakteristik dari seorang individu itu sendiri sangat kompleks. Dimana diri dari individu tersebut terdiri dari unsur-unsur nilai, langgam dalam berpolitik, kehidupan pribadi, dsb. Di mana unsur-unsur tersebut membangun diri individu tersebut untuk melakukan tindakan sosial dalam lingkungan nya. Sehingga hal tersebut menjadi sebuah kendala bagi para ilmuwan yang menerapkan analisis individu ini.

Karena kesulitan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan setelah mendapatka nya akan sulit untuk menafsirkan nya. Karena kesulitan tersebut

maka metode yang di gunakan adalah studi psikologik, dimana biasanya informasi yang di dapatkan berasal dari penelaahan dokumen resmi, arsip, pidato, makalah, serta buku biografi tokoh tersebut. Biasanya ini erat hubungannya dengan tehnik psiko-analisis sejarah hidup si tokoh.

Metode kedua yang biasanya di lakukan adalah analisis-isi (content analysis). Dalam metode ini kita akan menelaah tentang bahan-bahan tertulis seperti surat-surat, naskah pidato, berita koran tentang si tokoh, dsb (Mas'ood, Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisis dan Reorisis, 1989). Sedangkan metode ketiga adalah metode simulasi di mana metode ini memungkinkan suasana yang di diharapkan sama seperti objek tersebut rasakan dalam situasi tertentu.

Untuk mendukung teori ini ilmuwan mulai mengembangkan bahwa seorang manusia lebih banyak menggunakan nalurnya daripada oleh nalar atau tradisi kultural nya sendiri. Salah satunya seorang filosof Benedict Spinoza "*dasar dari setiap tindakan adalah upaya si pelaku tindakan untuk memelihara ketuhanan diri*". Dari pernyataan tersebut banyak yang berasumsi bahwa selalu ada konflik antara nalar dan nafsu. Apabila manusia hanya hidup berdasarkan nalar saja bisa saja hidup manusia di bumi ini damai. Akan tetapi manusia di berikan nafsu untuk menjadi lebih dan lebih atau menjadi "*yang ter..*" lebih daripada manusia lainnya sehingga menyebabkan "*lebih berbangga dengan kerusakan yang dia lakukan atas orang lain daripada kebaikan yang dia lakukan pada dirinya sendiri*". Banyak juga para filosof yang tidak setuju dengan pemikiran nalar-nafsu, akan tetapi tujuan kesimpulannya sama saja yaitu bahwa manusia itu sendiri memiliki hakekat menjad jahat. Morgenthau sendiri mengatakan bahwa manusia itu

sendiri suka mengejar kekuasaan, karena tidak adanya wewenang yang lebih tinggi daripada manusia itu sendiri di bumi, sehingga menyebabkan tidak adanya yang bisa mencegah untuk mengejar kekuasaan dengan menggunakan kekerasan.

Dalam membahas analisis individu ini terdapat pendekatan psikologik, salah satu ilmuwan sosial Heinz Eulau menyebutkan bahwa analisis pendekatan psikologik ini adalah "*Basis personal dari kehidupan politik*". Para ilmuwan juga lebih condong mempercayai bahwa perilaku politik itu sendiri adalah dampak dari sifat-sifat manusia yang sudah ada dari sananya atau lebih sering di sebut kepribadian. Sehingga perilaku politik itu sendiri muncul karena dampak dari bagaimana lingkungan individu itu tumbuh dari masa kecil nya hingga menyebabkan nilai-nilai yang tertanam dari kecil hingga dewasa melekat secara tidak langsung pada dirinya sendiri. Menurut teoritis kepribadian itu sendiri mengatakan bahwa sebenarnya kita tidak bisa secara langsung mengamati apa itu "kepribadian" itu, kita hanya bisa menafsirkan atau membentuk inferensi tentang individu tersebut dari pola yang ada dalam kepribadian nya dengan mengamati perilakunya.

Untuk menjelaskan keterkaitan antara Teorisasi tentang kepribadian ini akan sedikit di jelaskan mengenai Psikobiografi dan tipe-tipe nya menurut para ahli. Pertama Sigmund Freud yaitu, seorang teori psikoanalisis menyakini bahwa semua perilaku manusia itu memiliki sebab dan tentu saja bisa di jelaskan. Penyebab dari perilaku itu sendiri adalah manusia sendiri tentunya. Freud juga menyakini bahwa penyebab dasar dari perilaku tingkah manusia itu sendiri ada dalam alam bawah sadar. Teori tentang psikobiografi ini pertama kali di ajukan pada tahun

1930-an oleh Harold Lasswell dimana dia mengajukan argument Perilaku politik yaitu cara seorang aktor politik untuk memproyeksikan dirinya pada suatu objek publik yang kemudian membuat kepribadian dan perilakunya rasional atau merasionalisasikan tindakan itu dengan alasan kepentingan publik. Dalam analisis individu memiliki sebuah implikasi yang menyatakan bahwa orang-orang yang mengidap kepribadian yang tidak sehat, dan kestabilan psikologik yang tidak stabil biasanya menyalurkan nya dalam politik.

Disisi lain Lasswell menambahkan point penting dalam pemikirannya dengan menggabungkan pemikirannya dengan pemikiran Machiavelli yaitu, bahwa dalam diri manusia sendiri memang memiliki dorongan kepribadian politik yang dasar di mana tujuannya adalah unruk memperoleh kekuasaan. Kekuasaan tersebut akan di gunakan untuk mengendalikan orang lain tentunya. Pelampiasan seseorang terhadap kekuasaan di karena orang tersebut merasa tidak di cintai, lemah, dan merasa tidak terhormat. Para ilmuwan analisis individu ini mengatakan bahwa ada dua faktor yang mendasari orang ingin terlibat dalam dunia politik, pertama adalah kebutuhan untuk melakukan kontak sosial dengan orang lain dan kebutuhan dalam diri seseorang untuk ingin berprestasi. Dari dua faktor tersebut ilmuwan analisis ini mengkerucutkan menjadi sebuah dasar bahwa semua itu di lakukan untuk memenuhi kebutuhan nya sendiri/individu tersebut. Dalam menggunakan analisis individu dengan menggunakan alat "*kepribadian*" sebagai bahan telitinya menggunakan pendekatan mikro yang menyatakan bahwa manusia adalah faktor yang membedakan hasil sebuah kejadian dan bahwa kepribadian adalah determinan pokok dalam sebuah perilaku seseorang.

Di sisi lain pasangan ilmuwan suami istri George melakukan sebuah penelitian terhadap kehidupan dan karir seorang pemimpin yaitu Woodrow Wilson salah satu Presiden Amerika dan menemukan sebuah kesimpulan bahwa “*Kekuasaan memiliki nilai kompensatori yaitu sebagai alat untuk mengembalikan harga diri yang rusak di masa kanak-kanak*” (Mas'ood, Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisis dan Reorisas, 1989).

Selain pasangan suami istri George ada ilmuwan lain yang mengelompokkan berpengaruh nya kepribadian dalam analisis individu ini adalah James Barber. James memiliki dasar pemikiran dalam analisis individu ini adalah perilaku seorang presiden bukan hasil perhitungan rasional/pemikiran yang matang, akan tetapi adanya upaya untuk memenuhi keinginan pribadi yang ada dalam bawah sadarnya. James Barber melakukan sebuah penelitian terhadap tiga belas Presiden Amerika dan mengelompokkan nya menjadi empat dimensi kelompok yaitu pertama “*aktif-positif*” menurut James presiden-presiden yang tergolong dalam kategori ini tertarik dan adanya keinginan memperoleh kepuasan dalam dunia politik karena tujuan yang mereka capai adalah kesempatan untuk berprestasi. Di lihat dari masa lalu nya James menilik presiden-presiden yang termasuk dalam kategori ini memiliki masa kana-kanak yang memiliki kasih sayang dan “*support*” yang menyebabkan mereka tumbuh menjadi anak yang bangga akan dirinya sendiri. Sedangkan kelompok yang kedua adalah “*aktif-negatif*” di mana berpikir bahwa politik dan kekuasaan adalah hal yang satu dan tanpa di sadari adanya keinginan berkesempatan untuk mengendalikan orang lain itulah tujuan akhirnya. Tipe aktif-negatif ini juga pada masa kecilnya di indikasi kekurangan kasih sayang sehingga saat tumbuh

dewasa menjadi seorang pemimpin dirinya akan mencapai sesuatu untuk membuktinya. Dalam kategori ini James beranggapan bahwa presiden-presiden dalam kategori ini memiliki kebanggaan dan harga diri yang rendah. Pada masa menjadi seorang pemimpin dia akan menggunakan kekuasaannya dan keunggulannya demi mendominasi lawannya.

Kategori ketiga adalah "*pasif-positif*" biasanya kategori ini muncul di karena pada masa kecil individu tersebut kelebihan kasih sayang yang menyebabkan adanya kebutuhan akan penghormatan. Sedangkan tipe terakhir yaitu adalah "*pasif-negatif*" adalah presiden-presiden yang menjalankan tugasnya hanya karena dorongan kewajiban memenuhi tugas kemasyarakatan dan dorongan hanya karena kesetiaan akan tanah airnya. Dari keempat topik di atas James Barber menggunakan alat "sejarah kehidupan" dari masing-masing individu yang di kategorikan dengan menerapkan teori psikologi.

Dalam analisis individu ini juga bisa menggunakan dari teorisasi tentang persepsi. Naluri dan kepribadian adalah segi-segi individual yang bersifat static, sedangkan persepsi atau "*citra*" yang di miliki individu bersifat dinamik karena persepsi seringkali berubah (Mas'ood, Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisis dan Reorisas, 1989). Menurut Kenneth Boulding sebenarnya kita ini bereaksi terhadap citra kita terhadap dunia, salah satu pemikiran nya adalah

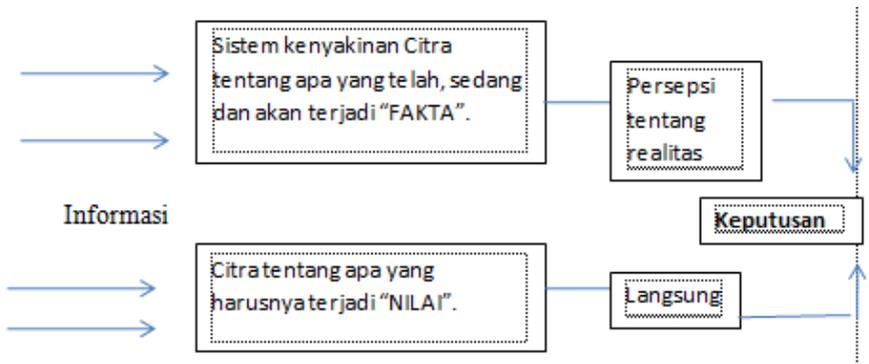
"kita harus mengakui bahwa orang-orang yang menentukan kebijaksanaan dan tindakan negara-negara tidak melakukan tanggapan terhadap fakta-fakta situasi yang "obyektif.." tetapi terhadap "citra" mereka tentang situasi itu. Yang menentukan

perilaku kita adalah persepsi kita tentang dunia, bukan kenyataan dunia itu”.

Di sisi lain Thomas Franck dan Edward Weisband mengatakan bahwa citra adalah hal yang penting dengan di dasarai oleh “*cara dua negara saling “melihat” satu-sama-lain sering menentukan cara mereka berinteraksi. Suatu pola kerjasama yang sistematis tidak mungkin berkembang diantara negara-negara yang masing-masing menganggap lawan sebagai jahat, agresif dan tidak bermoral”* (Mas'ood, Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisis dan Reorisis, 1989)).

Di sisi lain adanya keterhubungan antara citra, persepsi, dan perilaku di lingkungan internasional adalah bahwa munculnya keputusan politik luar negeri adalah timbulnya sebuah situasi permasalahan, dan sebelum permasalahan itu muncul untuk adanya tanggapan dari oleh para pembuat keputusan akan ada tiga hal yang terjadi. Sebagai berikut pertama adanya stimulus atau rangsangan dari lingkungan yang di sebut “*trigger event*”, kedua adanya upaya untuk mempersepsi stimulus itu di mana pada proses ini seorang individu akan menyeleksi, dan menilai informasi tentang lingkungannya, dan yang terakhir adalah adanya upaya menafsirkan stimulus yang telah di persepsikan itu.

Di sisi lain teorisasi persepsi ini mengatakan bahwa para pembuat keputusan akan di pengaruhi oleh berbagai proses psikologik dan kepribadian yang mempengaruhi persepsi akhirnya.



Bagan 1.1: Hubungan antara sistem keyakinan dengan pembuatan Kebijakan Politik Luar Negeri

Diagram di atas adalah penggambaran hubungan antara Sistem Kenyakinan dengan Pembuatan Keputusan Politik Luar Negeri yang di buat oleh R. Holsti. Dalam table tersebut bisa di jelaskan bahwa pada awalnya nilai dan kenyakinan seseorang membantunya apa yang ingin dia perhatikan setelah itu proses yang akan terjadi adanya stimulasi proses yang akan di saring oleh tiap individu untuk memilih nilai dan ditra apa yang akan dia pilih atau gambarkan. Terciptanya citra dan nilai yang di pilih akhirnya adanya interpretasi yang di lakukan seseorang individu tersebut. Tetapi sebelum melanjutnya dalam Citra sendiri terbagi menjadi dua yaitu, citra terbuka dan citra tertutup. Citra terbuka adalah adanya keterbukaan atas citra yang baru walaupun citra yang baru tersebut bertentangan dengan apa yang telah di percayai nya, biasanya yang terjadi akan adanya penggabungan atas citra yang telah di pegang dengan citra yang baru, atau bahkan mungkin adanya pergantian citra yang di percayai sebelumnya dengan citra yang baru karena biasanya supaya sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Citra

yang tertutup adalah lawan dari citra yang terbuka biasanya mereka menutup atau tidak mau menerima citra yang baru dan biasanya individu tersebut akan mengambil beberapa bagian dari citra yang mereka percayai untuk bisa mendukung argumen atau nilai mereka agar sesuai dengan realita.

Sistem keyakinan sendiri adalah kumpulan-kumpulan dari keyakinan, citra, atau “model” yang menggambarkan tentang dunia dan di percayai oleh seseorang. Sedangkan menurut Holsti sendiri

“Sistem Keyakinan terdiri dari serangkaian citra yang membentuk keseluruhan kerangka acuan atau sudut pandang (universe) seseorang. Cita-cita itu meliputi realitas masalalu, masakini, dan realitas yang di harapkan di masadepan, dan referensinilai tentang apa yang “seharusnya terjadi”.

Sedangkan interpretasi yang di dapatkan seseorang itu tergantung akan sistem keyakinan dan citra yang di miliki oleh pembuat keputusan itu.

Sebenarnya tidak semua nilai atau citra yang kita gambarkan bisa di interpretasikan sesuai dengan apa yang kita inginkan kepada orang lain hal ini lah yang biasanya menyebabkan adanya mispresepsi. Sedangkan mispresepsi itu sendiri adalah apabila suatu negara atau individu yang membuat keputusan tersebut di pandang secara berbeda dengan apa yang sebenarnya mereka lakukan atau ketika maksud mereka di interpretasikan secara berbeda (Mas'oed, Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisis dan Reorisas, 1989). Sebagai hal berikut yang mendukung adanya mispresepsi biasanya karena pertama, si pembuat keputusan baik itu individu atau negara kurang bisa memperhitungkan secara mendetail bahwa pesan, pidato, atau komunikasi yang di sampaikan bisa

saja di terima kurang jelas oleh orang lain. Kedua adanya pertentangan antara pesan yang ingin di sampaikan dengan perilaku individu atau negara tersebut yang biasanya tidak di sadari.

Dari uraian di atas atas Analisis Individu ini di harapkan bisa menjadi landasan kerangka pemikiran atas penelitian ini. Karena pada dasarnya penulis menyakini bahwa nilai dan citra yang di miliki oleh Presiden Francois Hollande mempengaruhi atas keberpihakan Prancis terhadap Pemerintahan Mali dalam Konflik Mali pada tahun 2012-2014.

E. Hipotesis

Dalam pemaparan di atas dapat diambil hipotesis mengapa Presiden Francois Hollande sebagai Presiden Prancis untuk berpihak terhadap pemerintah Mali dalam konflik di Mali yaitu:

Presiden Francois Hollande sebagai Presiden Prancis memihak pemerintah Mali karena di dorong oleh nilai-nilai dan idea yang di latar belakangin oleh masa kecil nya, ideologi dan partai, serta kepercayaan.

F. Batasan Penelitian

Batasan dari penulisan dalam membahas kejadian ini adalah di mana ruang lingkup kejadian ini di mulai sejak tahun 2013 dengan fokus utama kejadian atau tindakan Prancis terhadap suatu konflik yang terjadi di Mali atas perintah Presiden Francois Hollande. Tetapi tidak menutup kemungkinan penulis akan menjelaskan di luar ruang lingkup tersebut seperti dengan menjelaskan atau menengok kembali hubungan antara Prancis dan Mali sebelum tahun 2013 atau kejadian-kejadian pencetus konflik Mali sebelum tahun 2013 dari semenjak tahun 1960-2012.

G. Metodologi Penelitian

Tipe penelitian yang akan di lakukan untuk skripsi ini adalah deskriptif, di mana tipe penelitian ini diharapkan dapat membantu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Francois Hollande untuk berpihak pada pemerintah Mali dalam konflik di Mali. Tehnik pengumpulan data yang di gunakan penulisan adalah metode telaah pustaka (Library Search) dengan mengumpulkan berbagai sumber literature yang biasanya berupa buku-buku, dokumen, jurnal-jurnal, majalah, serta surat kabar yang semua nya bisa berupa berita secara *offline* atau *online*. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

H. Sitematik Penulisan

Bab 1 akan menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Teori, Hipotesis, Tujuan Penelitian, Batasan Penelitian, metodologi penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab 2 akan menjelaskan mengenai Sistem Pemerintah dan Politik Luar Negeri Prancis.

Bab 3 akan menjelaskan mengenai Sejarah Konflik di Mali sebelum Prancis Mengintervensi dan Intervensi Prancis terhadap konflik Mali.

Bab 4 Akan menjelaskan mengenai alasan Nilai dan citra apa saja yang mempengaruhi Intervensi Prancis dalam Konflik Mali.

Bab 5 akan menjelaskan mengenai Kesimpulan atas uraian dari bab-bab sebelum nya.